

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya telah diatur pula tentang batas wilayah Negara, termasuk wilayah Papua. Namun, di Papua sendiri masih terdapat tindakan-tindakan separatis yang akan mengganggu kedaulatan Negara. Wilayah Papua memang memiliki perbedaan etnis maupun historis dari wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Akan tetapi, Indonesia yang pada masa itu merupakan negara yang baru merdeka mengklaim seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk wilayah Papua, sehingga akhirnya Papua masuk ke Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pelanggaran ini dipicu oleh ketegangan politik yang terjadi di awal bergabungnya Papua dengan Indonesia, dimana ketegangan ini terjadi antara orang-orang yang menolak bergabung dengan Indonesia dengan pemerintahan Indonesia. Sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, hingga yang terbaru di tahun 2019 adalah kasus di Wamena. Pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi mendorong Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga terbentuklah gerakan separatis yang bernama *Free Papua Movement* (FPM) pada tahun 1965. Semenjak terbentuk, telah banyak cara yang dilakukan FPM untuk meraih kemerdekaan seperti mengadakan dialog diplomatik dengan pemerintahan Indonesia hingga menggunakan kekerasan. Indonesia juga telah melakukan berbagai cara agar Papua tetap berada dalam NKRI, contohnya seperti pendekatan akomodasi untuk memperoleh dukungan rakyat



Papua dengan menghapuskan kebijakan Papua sebagai daerah operasi militer, serta menjadikan Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa itu. Merasa tidak cukup, FPM meminta bantuan kepada dunia internasional terkhusus kepada negara-negara Melanesia.

Dengan segala kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua, akhirnya Papua mendapatkan dukungan dari negara-negara Melanesia. Munculnya dukungan dari negara-negara Melanesia untuk FPM membuat Indonesia mengajukan permohonan bergabung dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan diterima sebagai Anggota *Observer* pada pada KTT MSG ke-18 di Fiji tahun 2011. MSG sendiri merupakan sub-organisasi regional Pasifik Selatan yang didirikan di Port Vila pada 14 Maret 1988, oleh para kepala pemerintahan negara-negara Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS). Organisasi ini berdiri berdasarkan visi dan misi dari para pemimpin negara anggota dan didukung oleh keinginan politik yang kuat untuk kebebasan negara-negara Melanesia dan wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial di Pasifik Selatan dan menjadi wadah untuk mengembangkan budaya, politik, sosial dan ekonomi yang lebih kuat.



Tentu saja ini menjadi hal yang menarik karena Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan organisasi ini dan terima bergabung karena dilihat dari visi dan misi dari pembentukannya, Indonesia bisa dikatakan tidak memenuhi syarat karena bukan negara dengan etnis Melanesian, meskipun ada beberapa wilayah dengan etnis Melanesia, yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Indonesia mendapatkan dukungan dari Fiji dan Papua Nugini. Setelah bergabungnya Indonesia dengan MSG sebagai Anggota *Observer*, langkah utama yang

dilakukan Indonesia adalah mengundang negara-negara anggota MSG untuk mengunjungi Papua dan secara langsung mengamati situasi aktual. MSG mulai menganggap Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang perkembangannya sangat baik bahkan lebih baik daripada negara-negara anggota MSG lainnya. Kemudian pada tahun 2014 Indonesia membuka pusat pelatihan budidaya dan pengelolaan rumput laut di Desa Mau dan memberikan bantuan sejumlah 500 ribu dollar AS untuk pembangunan gedung *Melanesian Spearhead Group Regional Policy Academy*, yang diberikan secara resmi oleh Sesmenko Polhukam RI kepada PM Fiji. Namun sebagai Anggota *Observer*, Indonesia belum memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara anggota penuh, seperti dalam hal pemungutan suara.

Tetapi masuknya Indonesia dalam MSG juga menuai perdebatan. Fiji dan Papua Nugini memang mendukung Indonesia, sementara Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru menolak bergabungnya Indonesia. Matthew Wale anggota parlemen oposisi di Kepulauan Solomon memberikan pernyataan, yaitu *"Well firstly Indonesia should be kicked out. Indonesia is not Melanesian, Indonesia does not have Melanesian interests at its heart and Indonesia is the oppressor of Melanesians in the regions of West Papua Irian Jaya they used to call it."* Ia menganggap bahwa tak seharusnya Indonesia bergabung dengan MSG, karena Indonesia bukanlah berasal dari ras melanesia. Namun pernyataan ini dibantah oleh Sade Bimantara selaku Duta Besar Indonesia di Canberra saat itu karena Indonesia telah berkontribusi sejak tahun 1960-an terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.

Menyusul Indonesia, FPM yang diwakilkan oleh *United Liberation Movement of West Papua* (ULMWP) turut mengajukan diri untuk bergabung dalam MSG sebagai anggota penuh. Namun, ULMWP hanya diterima sebagai Anggota *Observer* pada Juni 2015. Bergabungnya

ULMWP mendapatkan dukungan dari negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS. Ditahun yang sama dengan diterimanya ULMWP menjadi Anggota *Observer*, status Indonesia naik menjadi Anggota Asosiasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Direktorat Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya, partisipasi aktif dan lobi yang intensif dari delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan dari lima provinsi dengan budaya Melanesia (Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat) telah berhasil membuat Indonesia untuk menjadi Anggota Asosiasi di MSG. Tidak hanya itu, di tahun yang sama Indonesia memberikan bantuan sejumlah 2 juta dollar AS terhadap bencana badai Pam dan Winston kepada Vanuatu.

Sejak diangkat menjadi Anggota Asosiasi, daya tawar Indonesia dalam MSG secara bertahap meningkat karena Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan MSG. Pada tahun 2016 Indonesia telah mengalokasikan dana sekitar 75 juta dollar AS untuk merealisasikan program Kerjasama Selatan Selatan terhadap negara Melanesia yang terkena bencana. Dengan naiknya status keanggotaan berarti bahwa Indonesia dapat memonitor arah kebijakan MSG di masa depan, sehingga Indonesia dapat dengan mudah menyiapkan berbagai formula kebijakan jika kebijakan yang dikeluarkan oleh MSG itu sendiri bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini menjadi penting bagi penulis karena tindakan separatis yang dijalankan oleh Papua akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mencoba menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara MSG untuk mempertahankan Papua agar tidak memisahkan diri dari Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh suatu negara. Kedaulatan Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sedemikian rupa. Namun masih ada hal yang ditakutkan akan mengancam kedaulatan Indonesia, yakni tindakan separatis. Tindakan ini berkaitan dengan permasalahan di Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan cara meminta bantuan dari negara-negara *Melanesia*, yang memiliki kesamaan ras dengan Papua. Hal ini memicu Indonesia untuk bergabung dengan MSG meskipun sebagian besar suku di Indonesia bukan merupakan bagian dari ras Melanesia. Bergabungnya Indonesia adalah untuk memudahkan diri dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan, memonitor setiap arah kebijakan dan melakukan upaya-upaya agar kebijakan yang diambil MSG tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak melukai kedaulatan Indonesia itu sendiri. Indonesia mengupayakan pertahanan Papua dengan cara mendekati diri dengan negara-negara Melanesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka pertanyaan penelitian yang hendak penulis jawab melalui penelitian ini adalah bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan Papua melalui *Melanesian Spearhead Group* (MSG)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Indonesia dalam mempertahankan Papua melalui *Melanesian Spearhead Group* (MSG) melalui bantuan ekonomi.



1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian Hubungan Internasional dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian berikutnya.
2. Menjadi salah satu sumber referensi dan keustakaan ilmu hubungan internasional terutama di Universitas Andalas

1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan berbagai sumber sebagai acuan. Penelitian pertama merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Ronald May yang berjudul *The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity*. Jurnal ini berbicara tentang MSG secara umum. MSG merupakan pengelompokan sub-regional dari negara-negara Melanesia yang beranggotakan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Fiji, ditambah *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)*, sebuah koalisi yang mewakili pro-kemerdekaan Melanesia populasi Kaledonia Baru. Dalam hal populasi, tanah dan sumber daya, negara-negara Melanesia khususnya Papua Nugini adalah kekuatan dominan dalam politik dan ekonomi pulau Pasifik, dan telah bertanggung jawab besar selama beberapa tahun terakhir untuk meningkatnya minat dari etnis Cina dan Eropa di Pasifik. Kesepakatan negara-negara melanesian dimotivasi oleh rasa ingin memerdekakan negara-negara dengan ras melanesian dari kolonialisme. Penelitian ini juga membahas tentang struktur dari MSG itu sendiri. Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui seluk beluk dari MSG itu sendiri, serta dijadikan acuan untuk melanjutkan penelitian untuk bab-bab selanjutnya



Artikel jurnal kedua merupakan penelitian oleh Stephanie Lawson yang berjudul “*West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana persaudaraan etnis melanesia dan bagaimana negara-negara Melanesia saling mendukung. Pertemuan MSG di Honiara adalah contoh nyata klaim tentang persaudaraan Melanesia. Namun solidaritas yang dibangun bukan tidak adanya hambatan dan sering dilanda masalah, namun tidak ada yang sepelik antara Indonesia dengan Papua yang juga merupakan etnis melanesian. Selain mengisahkan pengambilalihan Indonesia atas Papua Barat dalam konteks dinamika dekolonisasi, perang dingin dan pembangunan regional awal, jurnal ini mengkaji munculnya identitas Melanesia dan MSG. Ini berfokus pada upaya baru-baru ini oleh orang Papua Barat untuk menjadi anggota MSG, aspek-aspek kunci dari peran Indonesia dalam subregional Melanesia, dan sejauh mana perkembangan ini menyoroti logika yang bersaing dalam politik regional dan internasional.

Logika dukungan MSG untuk tujuan pembebasan Kaledonia Baru yang diwakili oleh *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)* gagal diterapkan dalam situasi Papua Barat dengan gagalnya Papua Barat yang diwakili oleh *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* bergabung sebagai anggota penuh MSG. Keputusan MSG juga dapat dilihat sebagai kegagalan untuk mengakur catatan Indonesia di Papua Barat sebagai bentuk kolonialisme yang keras dan lebih parah dibanding penjajahan Prancis kepada Kaledonia Baru. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini melemahkan klaim adil Indonesia untuk hak kedaulatan. Seperti disebutkan sebelumnya, semakin diakui bahwa kedaulatan memerlukan lebih dari sekadar hak untuk menggunakan kekuasaan eksklusif dalam batas-batas teritorial tertentu, dan untuk mengharapkan sepenuhnya tanpa campur tangan.



Dalam analisis terakhir, tujuan mendasar dari kekuasaan kedaulatan negara modern dan apa yang mendasari legitimasinya adalah untuk melindungi warga negara dari bahaya, bukan untuk membuat mereka terancam bahaya, apalagi penyiksaan, penganiayaan, dan pembunuhan atas nama negara. Hal ini merupakan logika yang mendasari definisi kedaulatan negara sebagai 'tanggung jawab untuk melindungi' yang telah disepakati di PBB. Namun perilaku Indonesia di Papua Barat selama bertahun-tahun adalah contoh utama pembahayaan terhadap warganya. Ketika negara gagal dalam hal paling mendasar ini kemudian dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat internasional untuk memiliki beberapa tanggung jawab, sebagai contoh adalah intervensi kemanusiaan. Penelitian ini bermanfaat untuk melihat bagaimana tindakan Indonesia terhadap Papua, sehingga munculnya campur tangan dari masyarakat internasional.

Artikel jurnal ketiga berjudul *Kerjasama Teknik Indonesia–Melanesian Spearhead Group Terhadap Kebutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014* oleh Lia Kartika Tampubolon. Penelitian ini menggambarkan mengapa Indonesia menjalin kerja sama teknis dengan Melanesian Spearhead Group. Anggota Melanesian Spearhead Group adalah negara ras melanesia. Visi yang dimiliki oleh Melanesian Spearhead Group adalah dekolonisasi dan kebebasan diseluruh negeri Melanesia. Koalisi Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat mendaftar sebagai anggota Kelompok Tombak Melanesia. Indonesia berusaha mencegah Papua menjadi anggota Melanesian Spearhead Group dengan menjalin kerja sama teknis. Direktorat Kerjasama Teknis membagi kegiatannya menjadi dua jenis; operasi dan kegiatan dalam rangka memperkuat kerja sama. Masa depan kerja sama teknis Indonesia akan tergantung pada hal-hal seperti ketersediaan anggaran, sumber daya manusia dan kelembagaan.



Dukungan-dukungan yang diberikan oleh negara-negara anggota MSG terhadap Papua Barat mengharuskan Indonesia mengambil langkah. Kerjasama teknis merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia dan dijadikan sebagai alat diplomasi yang diharapkan dapat membuat sikap negara-negara yang nantinya akan bekerjasama dengan Indonesia hendaknya bergandengan dengan kepentingan Indonesia. Hal ini dilakukan Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Akhirnya, Menteri Luar negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri negara anggota Melanesian Spearhead Group telah mengeluarkan Joint Statement pada tanggal 15 Januari 2014 yang berisi tentang pengakuan masing-masing negara atas kedaulatan. Tak hanya itu, kedua belah pihak juga menghasilkan penolakan terhadap permintaan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) sebagai anggota tetap MSG. Penelitian ini berguna nantinya sebagai penunjang jawaban dari penelitian, yakni apa-apa saja upaya yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan Papua.

Artikel jurnal selanjutnya berjudul *Melanesia's test: The political quandary of West Papua* oleh Johnny Blades. Penelitian ini menggambarkan bahwa orang Papua Barat sering menyebut konflik yang terjadi di tanah airnya merupakan masalah regional. Sebagai sebuah bangsa, orang-orang Papua Barat secara historis diidentifikasi sebagai Kepulauan Pasifik dan khususnya sebagai orang Melanesia. Jika solusi regional diperlukan untuk mengatasi masalah politik di Papua Barat, akan sangat informatif untuk mengadopsi lensa regional dan mengeksplorasi cara negara-negara Melanesia lainnya, terutama pemerintah dan media dalam menyelesaikan masalah Indonesia dengan Papua Barat. Peristiwa antara keduanya coba dijelaskan dalam domain politik. Namun, liputan media tentang peristiwa yang sedang berlangsung di Papua Barat dan tanggapan MSG seakan bungkam. Masalah Papua barat tampaknya sudah dapat diinternasionalisasikan dan layak untuk dicermati lebih lanjut.



Di seluruh wilayah Pasifik sudah diadakan lokakarya dan konferensi tentang Papua Barat yang diadakan. Di kota-kota di seluruh dunia seperti Den Haag, Perth dan Oxford, kantor dibuka oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat untuk meningkatkan kesadaran. Film, novel grafis, festival musik memperhatikan kawasan misterius dan bermasalah di Pasifik Barat Daya ini. Jaringan internasional *Anonymous* baru-baru ini memasang kampanye peretasan yang menargetkan situs web negara dan perusahaan tingkat negara Indonesia untuk menarik perhatian masyarakat Papua Barat. Media sosial penuh dengan laporan tentang berbagai perkembangan dan kekejaman yang disaring dari Papua Barat. Lebih dari sebelumnya, masalah Papua Barat dianggap oleh banyak orang sebagai masalah regional, internasional dan media. Orang-orang Papua Barat tahu bahwa peluang mereka untuk berintegrasi ke wilayah itu bergantung pada prospek persatuan diantara negara-negara Melanesia. Melanesia yang bersatu adalah blok yang kuat, dan Indonesia tahu ini. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan tentang bagaimana kasus Papua dianggap sebagai masalah yang sudah berada ditingkat internasional. Oleh sebab itu Indonesia harus mengambil tindakan.



Artikel jurnal terakhir adalah penelitian dari dari M. Syapris Zahidi dan Musfiroh yang berjudul “*The Melanesian Spearhead Group in Terms of Indonesia’s Interest*”. Penelitian ini berbicara tentang kepentingan Indonesia bergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) didasari oleh tujuan untuk menjaga stabilitas dalam negeri yang dalam konteks ini mengacu pada penutupan gerakan separatis yang masih ada di Indonesia, seperti FPM (Gerakan Papua Merdeka), yang secara eksplisit menerima dukungan internasional dari negara-negara Melanesia yang memiliki latar belakang ras yang sama. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam yang dilakukan dengan Direktur Direktorat Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk

mendapatkan data yang valid. Dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, Indonesia di era Presiden Joko Widodo berusaha untuk bergabung dengan MSG untuk mencegah organisasi antar-pemerintah Melanesia mendukung kelompok-kelompok separatis yang bisa mengganggu persatuan republik Indonesia. Indonesia mau tak mau harus mendekati diri dengan negara-negara Melanesia meskipun hanya meraup sedikit keuntungan. Indonesia pun memberi bantuan ekonomi terhadap negara-negara anggota untuk membangun citra positif agar mempermudah Indonesia untuk mengambil bagian atau mempengaruhi kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh MSG. Penelitian ini bermanfaat untuk penulis nantinya karena menjelaskan masuknya Indonesia ke dalam MSG untuk menjaga kedaulatan negara.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis penelitian, penulis menggunakan dua kerangka konseptual. Yang pertama adalah *Economic Statecraft* dan yang kedua adalah bantuan luar negeri. Penulis merasa kedua konsep inilah yang paling cocok untuk menjawab hasil penelitian.

1.7.1 *Economic Statecraft*

Economic Statecraft merupakan penggunaan sarana ekonomi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri. Bantuan luar negeri, perdagangan, dan kebijakan yang mengatur aliran modal internasional dapat digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri dan dianggap sebagai bentuk paling umum dari *economic statecraft*. David A. Baldwin menjelaskan dalam *economic statecraft* bahwa *statecraft* didefinisikan sebagai seni dalam melakukan urusan negara. *Statecraft* juga didefinisikan sebagai aksi yang terencana dari negara untuk mengubah pihak eksternal (negara lain) baik kebijakan ataupun perilaku eksternal tersebut, sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan. Dengan adanya unsur *power*, maka *statecraft* dimaksud untuk memenuhi kepentingan yang dimiliki negara. *Economic statecraft*



merupakan kerangka kerja untuk membuat konsep tentang bagaimana instrumen kebijakan ekonomi yang sebenarnya digunakan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. *Economic statecraft* sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan instrument negara oleh pemegang kekuasaan politik untuk mencapai kepentingan luar negeri. Baldwin menjelaskan bahwa *economic statecraft* didefinisikan sebagai:

1. *Emphasizes means rather than ends*, dimana *economic statecraft* lebih menekankan maksud dari pada hasil akhirnya.
2. *Economic statecraft does not restrict the range of goals that may be sought by economic means*, secara empiris fakta yang tidak terbantahkan bahwa para pengambil kebijakan sering menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan yang lebih luas dari tujuan ekonomi.
3. *Economic statecraft* memasukkan definisi ekonomi, sehingga dapat membedakan antara teknik ekonomi dan yang bukan.

Baldwin membagi *Economic statecraft* ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Economic Sanction*

Baldwin membagi sanksi ekonomi menjadi dua, yakni sanksi positif dan sanksi negatif. Secara sederhana, ia membedakan bahwa sanksi positif didefinisikan sebagai sanksi yang memberikan atau menjanjikan kepada negara target dengan suatu hadiah/pemberian, sedangkan sanksi negatif didefinisikan sebagai sanksi yang akan memberikan dengan suatu bentuk ancaman hukuman. Contoh dari sanksi positif adalah pemberian bantuan luar negeri ataupun investasi, sementara contoh dari sanksi negatif adalah seperti embargo ekonomi.



2. *Economic Warfare*

Tujuannya adalah untuk menangkap sumber daya ekonomi penting dari lawan untuk mencegah lawan tersebut beroperasi dengan benar. Alat ini digunakan ketika selama persiapan perang hingga perang berlangsung. Kebijakan khas yang diterapkan dan dimasukkan dalam *economic warfare* adalah blokade, pembelian tertutup, menangkap aset musuh dan mem-*blacklist* musuh.

Kemudian, *Economic Statecraft* ini memiliki tiga variabel. Jadi, suatu aktor jika ingin menggunakan *Economic Statecraft* adalah dengan melihat tiga variabel seperti berikut:

1. *Threat to Sender*

Variabel *threat* mengacu pada tingkat ancaman yang diidentifikasi oleh pengirim. Semakin tinggi ancaman terhadap *sender*, semakin tinggi komitmen *sender* untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

2. *Salience*

Variabel ini mengacu pada tingkat kepentingan yang melekat pada isu yang dibuat si aktor, apakah isu itu penting oleh tidak oleh sang pengirim.

3. *Complexity of Dispute*

Merupakan variabel yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana tingkat kerumitan dari sebuah perselisihan, dimana ketika sender dan target masuk ke perselisihan dengan melihat peluang menang tinggi karena *interest* dipertaruhkan. Jika kalah, konsekuensinya sanksi dapat diterapkan untuk menghilangkan musuh.

Dapat disimpulkan bahwa *economic statecraft* menjelaskan bagaimana negara melakukan kebijakan ekonomi sebagai upaya lanjutan suatu kebijakan politik dalam mengejar kepentingan



nasional. Konsep ini bisa menjawab pertanyaan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Penulis nantinya akan mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan Papua, yakni mendekati diri dengan negara-negara Melanesia dengan cara memberikan sanksi ekonomi. Namun sebelum mendeskripsikan sanksi ekonomi apa saja yang akan diberikan oleh Indonesia, penulis menganalisis apakah Indonesia cocok dengan ketiga variabel di atas.

Melalui tiga variabel di atas, peneliti mendeskripsikan sejauh mana ancaman terhadap kedaulatan NKRI atas keinginan Papua untuk keluar dari Indonesia. Ketegangan politik, dan konflik-konflik yang terjadi akibat pelanggaran HAM di Papua tentu saja memberikan berdampak buruk terhadap kedaulatan NKRI. Pemberontakan dan konflik yang terjadi di Papua dapat menggambarkan lemah sistem pertahanan nasional NKRI. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang lemah tentu akan berdampak buruk bagi stabilitas negara itu sendiri. Oleh karena itu, melihat besarnya ancaman terhadap kedaulatan NKRI membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk meredam konflik yang terjadi di Papua sekaligus mencegah keluarnya Papua dari Indonesia dengan cara masuk ke dalam MSG untuk mendekati diri dengan negara-negara anggota, kemudian memberikan berupa bantuan agar negara-negara tersebut tetap berteman dengan Indonesia.



1.7.2 Bantuan Luar Negeri

Bantuan Luar Negeri Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana. Dalam membahas bantuan luar negeri, pengertian bantuan luar

negeri diartikan oleh sejumlah pakar. Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya “The Political Economy of International Relations” yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti dalam bukunya “International Politics: Framework of Analysis” mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima. Bantuan luar negeri diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain.

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu. Bantuan ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material kebendaan saja, namun juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa. Bantuan luar negeri tersebut digolongkan ke dalam empat jenis bantuan, yaitu:

1) Bantuan Program (*Programme Aid*)

Bantuan Program merupakan bantuan yang diberikan untuk sektor umum disuatu negara penerima bantuan. Contohnya yaitu pendanaan sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, militer dan transportasi umum. suatu negara. Bantuan program langsung diberikan ke negara penerima melalui sistem akuntansi lokal mereka.

2) Bantuan Proyek (*Project Aid*)

Bantuan Proyek adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai



kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru. Bantuan Proyek biasanya diberikan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, pelabuhan, bendungan, proyek irigasi, dan proyek telekomunikasi.

3) Bantuan Teknik (*Technical Assistance*)

Bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Inti daripada bantuan teknik ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.

4) Bantuan Kemanusiaan (*Humanitarian Aid*)

Tujuan utama dari bantuan kemanusiaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan situasi kehidupan masyarakat di negara penerima. Bantuan Kemanusiaan diberikan sebagai respon terhadap bencana alam, di mana persediaan darurat seperti pertolongan pertama, air, makanan dan pakaian dikirim ke negara yang membutuhkan. Negara pendonor juga dapat mengirim layanan seperti sukarelawan perawatan kesehatan untuk membantu upaya pemulihan.

Negara pendonor maupun negara yang mendapatkan bantuan pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari serah terima bantuan yang dilaksanakan. Bantuan luar negeri memiliki azas timbal balik, di mana secara historis sulit untuk ditemukan fakta bahwa bantuan yang diberikan hanya berdasarkan kebaikan negara pendonor semata. Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu terutama ialah *self interest* politik, strategi dan ekonomi, sekalipun pada umumnya alasan itu berupa moral atau kemanusiaan. Jadi sulit ditemukan adanya



bantuan yang diberikan tanpa dilandasi oleh kepentingan. Bentuk-bentuk bantuan ini merupakan wujud dari upaya Indonesia dalam mempertahankan Papua, yaitu dengan memberikan bantuan ekonomi. Dengan bergabungnya Indonesia dalam MSG, mempermudah Indonesia dalam memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara anggota untuk meredam dukungannya terhadap pembebasan Papua dari Indonesia. Berdasarkan bentuk-bentuk bantuan luar negeri di atas, peneliti mengidentifikasi bentuk bantuan mana saja yang nantinya akan diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara anggota MSG.

1.8 Metodologi

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif sebagai bentuk pemaparan data-data yang didapatkan berupa tulisan ilmiah dan pendeskripsian fakta aktual yang tergambar dari hasil penelitian. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis analisis deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data berupa situs resmi dari Kementerian Luar negeri Indonesia dan *Melanesian Spearhead Group*, laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Indonesia, *Melanesian Spearhead Group* dan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan Papua. Penulis memaparkan interpretasi data-data yang didapat dari penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan situs yang membahas mengenai objek penelitian dan menghubungkan data tersebut dengan data lainnya serta pemilihan sumber yang dianggap paling relevan sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.



1.8.2. Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar, penulis mencoba memberi batasan penelitian yaitu semenjak tahun 2011, di mana pada tahun ini Indonesia pertama kali diterima sebagai anggota MSG sebagai negara pengamat hingga tahun 2019, di mana pada tahun ini kembali lagi meletusnya kasus HAM yang terjadi di Wamena, Papua.

1.8.3 Tingkat dan Unit Analisis

Dalam penelitian, dibutuhkan suatu pemahaman tentang tingkat dan unit analisis guna membantu peneliti dalam menyederhanakan objek yang diteliti. Unit analisis dipahami sebagai bagian yang akan diteliti dan dideskripsikan. Pada penulisan ini, unit analisis yang digunakan adalah Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah kepentingan Indonesia terhadap Papua.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Teknik dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dimana melakukan pengumpulan data dan berdasarkan penelusuran literature reviews. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari dokumentasi dan publikasi yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti lain. Data-data tersebut dapat berupa artikel yang ditulis oleh Stephanie Lawson, Ronald May, Lia Kartika Tampubolon, Johnny Blades dan M. Syaprin Zahidi serta Musfiroh dan jurnal lain terkait penulisan penelitian ini. Serta artikel yang relevan pada objek penelitian, maupun laporan dari



instansi terkait seperti dokumen-dokumen dari Kementerian Luar Negeri, dokumen dari *Melanesian Spearhead Group* dan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Disamping itu, penulis juga memanfaatkan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara *keyword* yang digunakan adalah kedaulatan, Papua, *Melanesian Spearhead Group*, *economic statecraft* dan bantuan ekonomi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan melalui beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengelompokan data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Awalnya peneliti mengumpulkan data terkait tentang bagaimana keadaan Papua di Indonesia, kemudian bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan Papua melalui MSG. Kedua adalah tahap reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penyeleksian terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Ketiga adalah tahap interpretasi dan penyajian data. Data-data yang telah diseleksi tadi akan diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual *Economic Statecraft* oleh David Baldwin. Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan Papua melalui MSG.



1.9 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan pengolahan data, seta sistematika penulisan.

Bab II: Kepentingan Indonesia Terhadap Papua

Pada bab ini, peneliti menjabarkan kepentingan Indonesia terhadap Papua, sehingga Papua sangat penting untuk dipertahankan oleh Indonesia.

Bab III: Dinamika Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*

Pada bab ini peneliti memaparkan dinamika atau hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia selama bergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*.

Bab IV: Upaya Indonesia Untuk Mempertahankan Papua Melalui Keanggotaannya di MSG

Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan Papua melalui *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dengan menggunakan konsep *economic statecraft* oleh David Balwin.

Bab V: Kesimpulan

Pada bab ini peneliti menuliskan kesimpulan dan hasil dari penelitian peneliti dan juga saran.

